

ABSTRAK

Yuli Siti Azahro: *Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang di Tinjau dari Siyasah Maliyah*

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Penerimaan Pajak daerah dapat dikatakan efektif apabila pencapaian hasil telah sesuai target yang telah ditentukan. Tetapi berbeda halnya dengan di kabupaten Sumedang, bahwa realisasi penerimaan Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan pada tiga tahun terakhir memperoleh hasil yang tidak efektif.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan mengenai strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan, mendeskripsikan mengenai dampak strategi dari pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan, serta mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap strategi dan dampak Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip *maslahah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan peraturan pajak daerah.

Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: *pertama* strategi badan pendapatan daerah Sumedang yaitu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, pemberdayaan masyarakat, memberikan fasilitas “titip bayar”, mengadakan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan bersama bank bjb, penyediaan sistem aplikasi perpajakan modern, pembayaran online, dan pelayanan mobil bapenda keliling. *Kedua* dampak strategi badan pendapatan daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, penilaian negatif terhadap aparaturnya pemungutan pajak, dan adanya objek pajak yang kosong. *Ketiga* ditinjau dari siyasah maliyah fungsi kebijakan ekonomi Islam diarahkan langsung pada setiap pemangku kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan *maslahah*.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Siyasah Maliyah